

HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENDUDUK YANG BERSEKOLAH FORMAL DI KABUPATEN ACEH BARAT

¹Yasrizal, ²Mahrizal

¹ Dosen Universitas Teuku Umar
yasrizal@utu.ac.id

² Dosen Universitas Teuku Umar
mahrizal@utu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the relationship between government expenditure in the education sector on the number of people who attend formal schools in West Aceh Regency in the period 2005-2015. The model used is the Vector Autoregressive (VAR) model to see if there is a causality relationship between the education expenditure variable and the number of school students in West Aceh. Based on the Granger Causality Test on the two variables namely education expenditure and number of schools shows that there is no causality relationship between the two variables during the period 2005 to 2015. This is because many other factors influence government expenditure and the number of schools both government policy variables that do not looking at the number of schools, the problem of budget compliance in allocating education costs as much as 20 to the influence of budget politics. The influence of the education budget in the short term sometimes increases also decreases its influence unstable every period sometimes negative as well as the number of schools each period

Keywords: *Education Expenditures, Number of School Students and Vector Autoregressive (VAR)*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut, oleh sebab itu maka pembangunan ekonomi pada suatu daerah sangat diperlukan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Kuncoro 2004, h.83).

Pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan tersebut, karena prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya menghadapi perbenturan kepentingan sehingga dibutuhkan koordinasi. Peranan pemerintah di dalam ekonomi modern dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar yaitu peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, yakni pengelolaan penerimaan dan pengeluaran

pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah, apa bila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

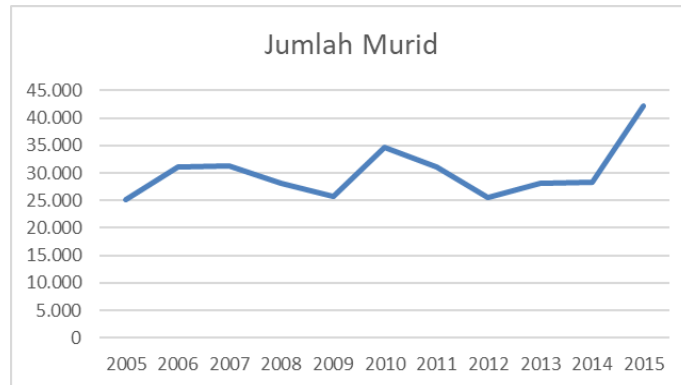
Ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas pendidikan. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Upaya ini tidak biasa diharapkan akan disediakan sepenuhnya oleh sektor swasta mengingat biaya penyediaan pendidikan yang besar dan tidak menghasilkan keuntungan yang seketika. Pengeluaran publik untuk sektor pendidikan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Negara tetangga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian modern. Pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan.

Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04⁰⁰6' dan 04⁰⁴7' Lintang Utara serta antara 95⁰⁵2' dan 96⁰³0' Bujur Timur dengan luas 2.927,95 Km². Ibu kota kabupaten ini adalah Meulaboh yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan. Kecamatan terluas adalah Sungai Mas yang menempati 26,70 persen wilayah Aceh Barat, sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang hanya menempati 1,53 persen luas wilayah Aceh Barat. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie disebelah utara, selanjutnya Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia disebelah selatan. Sedangkan pada sebelah timur kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Samudera Indonesia membujur di sepanjang barat daerah ini (BPS Kabupaten Aceh Barat, 2014).

Setiap daerah akan memiliki tingkat pelayanan publik, salah satunya pada Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan memiliki kualitas pendidikan yang baik. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pada investasi sumber daya manusia, karena dengan adanya tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi pula dalam mengatasi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu anggaran pemerintah yang tersedia harus mampu sejalan dengan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Jumlah pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Barat dengan pendidikan negeri yaitu sebanyak 247 unit dan untuk pendidikan swasta yaitu sebanyak 52 unit. Berikut perkembangan jumlah pendidikan formal yang ada di Kabupaten Aceh Barat:

Grafik 1 Jumlah Penduduk yang Bersekolah Formal di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Aceh Barat meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Dimana pada tahun 2005 berjumlah 25.091 jiwa jumlah ini meningkat pada tahun 2006 menjadi 31.023 jiwa, atau tumbuh 23,64 persen, dan pada tahun 2007 tercatat sebesar 31.200 jiwa peningkatan ini terjadi hingga tahun 2015 yaitu sebesar 42.101 jiwa atau tumbuh 48,28 persen dari tahun 2014. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat terlihat meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan terhadap jumlah penduduk yang bersekolah formal di Kabupaten Aceh Barat ?

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu

Muhammad Ikhwan (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan PDRB Per Kapita terhadap Pembangunan Pendidikan di Provinsi Aceh” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh dengan menggunakan pengujian data panel. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita digunakan sebagai variabel bebas.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melek huruf. Selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). PDRB per Kapita juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan untuk angka partisipasi sekolah menengah atas (SMA) berpengaruh positif dan signifikan. Terbukti bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita mempengaruhi pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu,

Pemerintah Aceh harus memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pendidikan lebih besar dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah agar pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh menjadi lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat pengujian hipotesis, yaitu menguji hubungan kausalitas pengeluaran pendidikan dan jumlah yang sekolah di Aceh Barat. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada pengujian hubungan kausalitas kedua variabel tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. berupa nilai nilai tahunan pengeluaran pendidikan dan selama periode pengamatan tahun 2005 s.d 2015. Data diambil langsung jumlah yang sekolah diambil dari dinas pendidikan dan pengeluaran pendidikan dari dinas pengelolaan keuangan daerah Aceh Barat. Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model Vector Autoregressive (VAR) untuk melihat apakah ada hubungan kausalitas antara variabel pengeluaran pendidikan dan jumlah siswa sekolah di aceh barat. Namun sebelum membentuk model VAR, ada beberapa langkah pengujian yang harus dilakukan. Menurut Widarjono (2007:345), langkah pertama pembentukan model VAR adalah uji stasioner data. Jika data telah di tingkat level, maka model yang digunakan adalah model VAR biasa. Selanjutnya baru digunakan uji unit root test, penentuan lag optimal, uji kausalitas granger.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

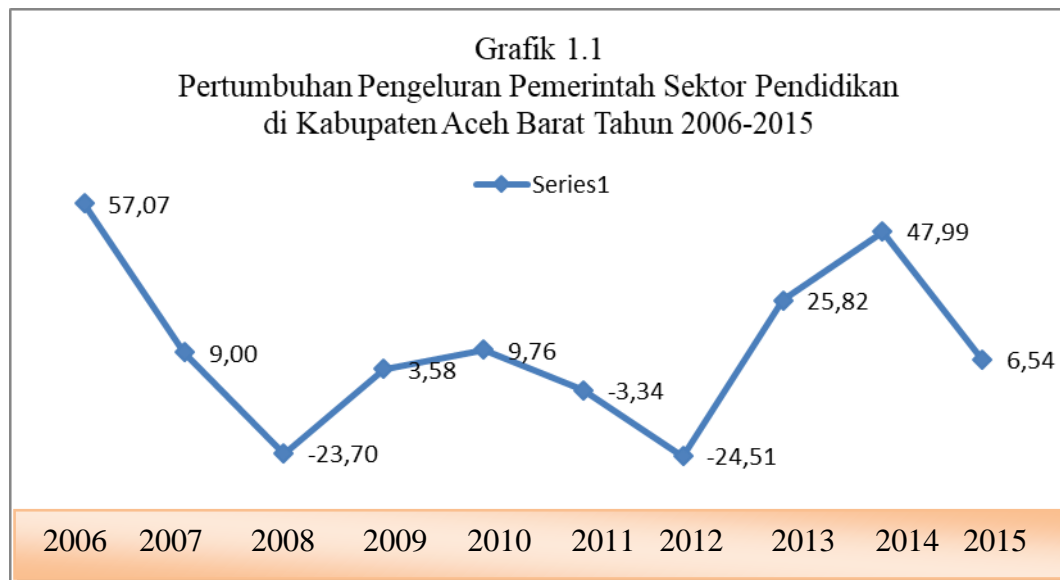
Keadaan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Tingginya pengeluaran pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian daerah oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu memperhatikan jenis pengeluaran yang dilakukan di daerah. Pengeluaran pemerintah ini bisa berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Salah satu pengeluaran rutin pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dialokasikan pada sektor pendidikan karena kita ketahui bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimulai dari pendidikan. Sebagai daerah yang sedang berkembang Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang masih ketinggalan dalam hal pendidikan oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Aceh Barat hal ini dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran di sektor pendidikan untuk memfasilitas sarana pendidikan baik infrastruktur maupun sarana penunjang lainnya.

Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa : Tap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga

negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan. Grafik dibawah ini sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat secara lebih jelas dapat dilihat pada



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2018)

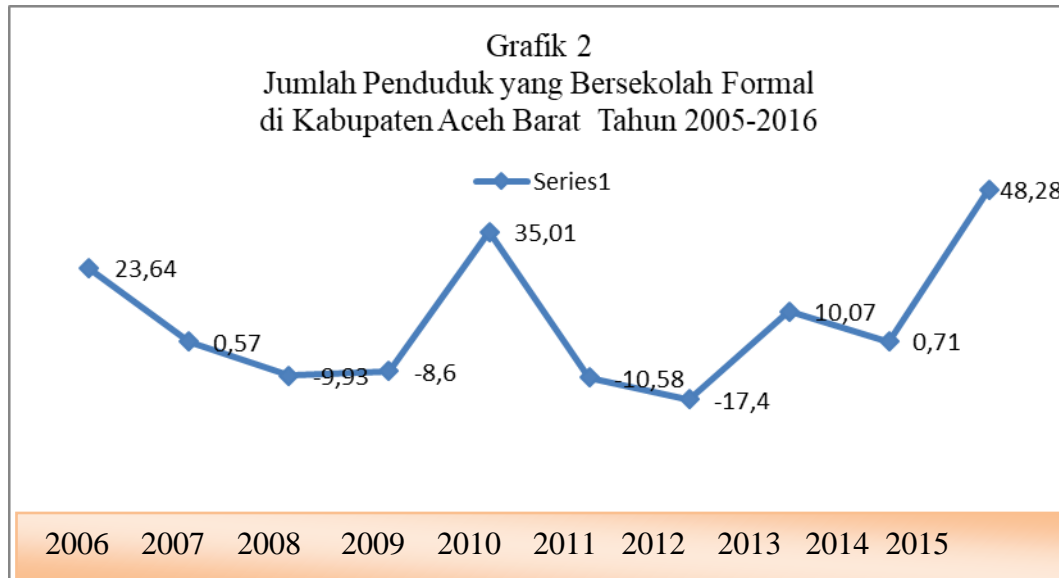
Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar 57,07 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan rehabilitasi beberapa rumah sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan ini menurun pada tahun 2007 yaitu sebesar 9 persen. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2008 yakni sebesar -23,7 persen. Penurunan ini merupakan yang tertinggi disepanjang tahun 2006-2015. Kemudian hingga tahun 2015 pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat turun sebesar 37,81 persen dari tahun 2014. Meskipun tingkat pertumbuhannya menurun namun realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat tergolong cukup tinggi dan terlihat meningkat dari tahun 2005 dan 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Aceh Barat .

4.2. Keadaan Jumlah Penduduk yang Bersekolah Formal di Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan gratis adalah harapan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki harapan dan tidak berani bermimpi bisa mengenyam pendidikan. Kebijakannya telah terealisasi dan sedang gencar-gencarnya disosialisasikan lewat berbagai media. Kebijakan sekolah gratis ini merupakan bentuk realisasi anggaran pendidikan 20% yang sejak dulu digodok parlemen. Masyarakat tentu senang dengan adanya sekolah gratis. Pendidikan yang mahal dan sulit semakin sirna. Mereka bisa lebih lega dalam menyekolahkan anak-anaknya.

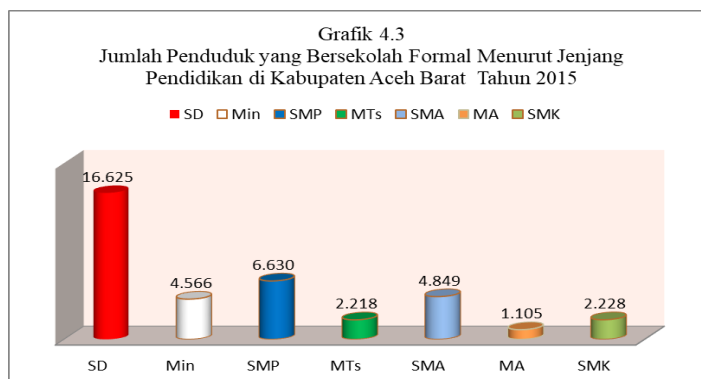
Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Aceh Barat meskipun terjadi fluktuasi

dalam beberapa tahun terakhir. Dimana pada tahun 2005 berjumlah 25.091 jiwa jumlah ini meningkat pada tahun 2006 menjadi 31.023 jiwa, atau tumbuh 23,64 persen, dan pada tahun 2007 tercatat sebesar 31.200 jiwa. kemudian di tahun berikutnya yakni 2008-2015 terjadi fluktuasi pertumbuhan hal ini dapat dilihat pada Grafik 4.2 berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2018)

Grafik di atas memperlihatkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah formal dari tahun 2005-2015. Namun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun. Dimana pada tahun 2006 tumbuh sebesar 23,64 persen jumlah ini menurun pada tahun 2007 menjadi 0,57 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah murid yang masuk sekolah dikarena oleh tingkat pertumbuhan murid usia sekolah menurun. Disamping adanya masyarakat yang berpindah sekolah ketempat lain juga turut menentukan menurunnya jumlah penduduk yang besekolah di Kabupaten Aceh Barat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 48,28 persen. Jika dilihat dari jenjang pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 didominasi oleh jenjang pendidikan SD. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 4.3 berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (2018)

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bersekolah formal di Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan SD

yaitu sebanyak 16.625 jiwa kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan SMP yaitu sebesar 6.630 jiwa sedang tingkat pendidikan terendah di Kabupaten Aceh Barat adalah MA yaitu sebesar 1.105 jiwa.

Berdasarkan data tersebut di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk yang bersekolah formal di Kabupaten Aceh Barat adalah anak-anak ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Aceh Barat masih tinggi. Disamping itu banyak diantara anak-anak yang putus sekolah ketika tamat SD sehingga partisipasi sekolah pada tingkat SMA menurun.

Analisis dan Pembahasan Model VAR

Uji Unit Root Test

Hasil uji menggunakan uji unit root. Pengujian menggunakan pendapat dari Phillips-Perron test hasilnya menunjukkan bahwa inflasi (INF) dan nilai tukar (ER) telah stasioner pada tingkat 2nd difference, dimana nilai statistik dari kedua variabel tersebut lebih kecil dari nilai kritis 5 persen. sehingga menolak H0 dan menerima H1

Uji Lag Optimal Uji

Lag Information Criteria, didapatkan bahwa lag yang optimal adalah pemilihan lag yang terkecil dan paling banyak bintang (*) pada tabel tersebut yaitu sebesar 2. Pemilihan lag 2 dimaksudkan agar semua informasi dapat dimasukkan ke dalam model analisis. Selain itu, jumlah sampel yang relatif panjang masih sangat memungkinkan untuk menggunakan lag 2. Secara ringkas, hasil uji Lag Optimal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 1. Hasil *Lag Information Criteria*

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	8.771907	NA*	0.000763	-1.504.868	-1.461.040	-1.599.448
1	12.84296	5.428071	0.000790	-1.520.658	-1.389.175	-1.804.398
2	21.24370	7.467321	0.000374*	-2.498599*	-2.279461*	-2.971499*

Sumber: Lag Information Criteria menggunakan EViews dengan analisis VAR, diolah 2018

Uji Kausalitas Granger

Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PP does not Granger Cause JS	9	4.08901	0,749305556
JS does not Granger Cause PP		4.76257	0,607638889

Sumber: Hasil Uji Kausalitas Granger menggunakan Eviews, 2018

Nilai probabilitas Pengeluaran pemerintah (PP) terhadap Jumlah Sekolah (JS) sebesar 0,1079. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat probabilitas ($0,107 > 0,05$). Begitu juga Jumlah Sekolah (JS) terhadap Pengeluaran Pemerintah (PP) untuk pendidikan yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0875. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat probabilitas ($0,0875 > 0,05$). Oleh karena itu, maka hasil uji tersebut menerima H0, yaitu tidak ada hubungan kausalitas antar kedua variabel PP dan JS.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak ada hubungan dengan jumlah yang sekolah karena selama periode pengamatan yaitu tahun 2005 s.d 2015 nilai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan bukan diprioritaskan pada jumlah anaka-anak yang menempuh

pendidikan di sekolah baik SD, SMP, dan SMA. Pergerakan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Faktor tersebut seperti pengaruh kebijakan politik, pembangunan fisik dan pembiayaan lainnya yang bukan menitik beratkan pada jumlah yang sedang anak yang bersekolah

Hasil Uji Impulse

Response Function (IRF) Hasil IRF akan menjelaskan dampak dari guncangan pada satu variabel terhadap variabel lain, dimana dalam analisis dapat melihat respon dinamika jangka panjang setiap variabel apabila ada inovasi (shock) tertentu. Pengaruh variabel bisa positif ataupun negatif. Hasil uji IRF secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3-4

Tabel 3. Hasil uji impuls function PP terhadap JS

Response JS			
Period		PP	JS
	1	0.000000	0.109075
	2	0.079514	-0.122284
	3	-0.004376	-0.081037
	4	-0.085287	0.082082
	5	-0.024881	0.118439
	6	0.081483	-0.035148
	7	0.062940	-0.152839
	8	-0.066796	-0.020660
	9	-0.098091	0.164247
	10	0.036016	0.088881

Sumber: Hasil uji IRF menggunakan Eviews 7. 2018

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa, pengeluaran pendidikan mulai direspon oleh jumlah sekolah pada periode pertama, yaitu positif sebesar 0,109075, dan periode keempat sampai ke lima masing-masing 0,082082-0,118439 Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bersekolah direspon oleh pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek. Selanjutnya, jumlah sekolah juga direspon oleh pengeluaran pendidikan pada periode kedua hingga ke tiga, keenam hingga ke delapan arahnya negatif dan ke sembilan hingga kesepuluh juga arahnya positif hal ini pengeluaran pemerintah untuk jumlah bersekolah direspon dalam jangka pendek.

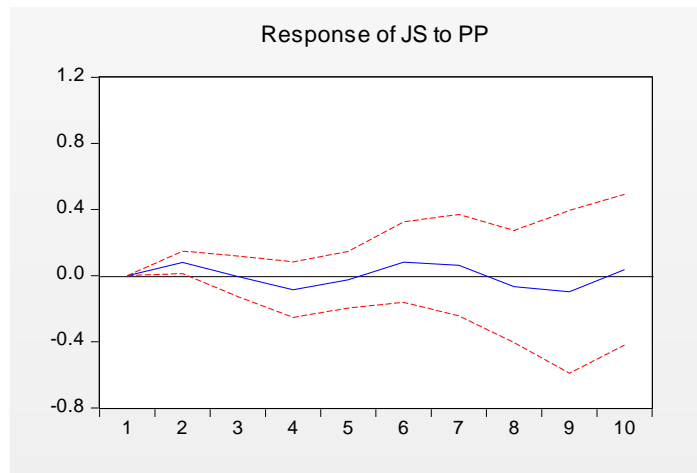
Tabel 4. Hasil uji impuls function JS terhadap PP

Respon PP			
Period		PP	JS
	1	0.113991	-0.027417
	2	0.074986	-0.151574
	3	-0.055262	-0.095928
	4	-0.143410	0.211292
	5	0.019513	0.154307
	6	0.167875	-0.168046
	7	0.043120	-0.237665
	8	-0.169671	0.089037
	9	-0.117788	0.305885
	10	0.143818	0.022447

Sumber: Hasil uji IRF menggunakan Eviews 7. 2018

Hubungan jumlah sekolah dengan anggaran pendidikan periode pertama negatif sebesar $-0,027417$ hingga periode ketiga dan periode enam hingga ketuju sementara pada periode keempat hingga kelima dan kedelapan hingga periode kesepuluh respon positif.

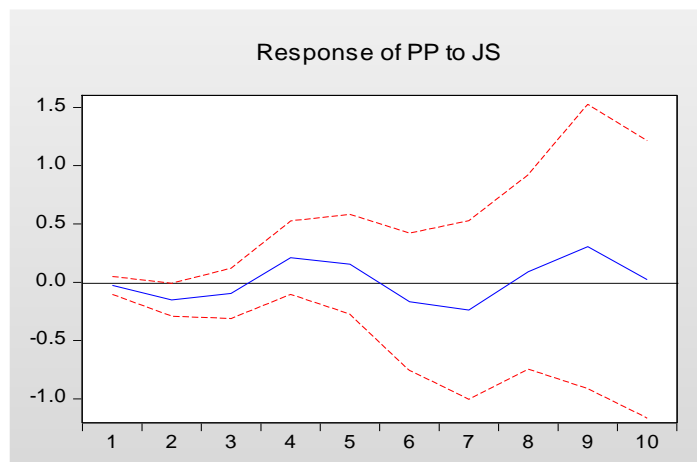
Hasil Uji Impulse Respon Function Pengeluaran Pendidikan (JS) terhadap Jumlah Sekolah (PP)



Sumber: Hasil IRF menggunakan Eviews, 2018 (diolah)

Pembahasan IRF hanya difokuskan kepada kausalitas antara variabel JS dan PP. Berdasarkan Gambar 4, pengeluaran pendidikan merespon shock jumlah bersekolah secara positif pada periode ke satu hingga kedua. Namun setelah periode ke 2 justru terlihat merespon negatif terus mengalami fluktuasi antara negatif dan positif. Perubahan jumlah jumlah sekolah dan pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan dalam jangka pendek cenderung mengalami perubahan ke arah positif atau negatif.

Hasil Uji Impulse Respon Function Pengeluaran Pendidikan (PP) terhadap Jumlah Sekolah (JS)



Sumber: Hasil IRF menggunakan Eviews, 2018 (diolah)

Dari hasil Impulse Respon Function (IRF) menunjukkan bahwa respon pengeluaran pendidikan dan jumlah sekolah di Aceh barat pertama adalah negatif pada periode pertama hingga ke tiga di periode keempat hingga periode kelima positif dan kembali turun pada garis negatif pada periode kedelapan hingga periode 10. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh PP dan JS selalu mengalami perubahan dalam jangka pendek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uji Granger Causality Test terhadap kedua variabel yaitu pengeluaran pendidikan dan jumlah sekolah menunjukkan bahwa, tidak ada hubungan kausalitas antar kedua variabel selama periode 2005 s.d 2015. Hal ini karena banyak faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan jumlah sekolah baik itu variabel kebijakan pemerintah yang tidak melihat pada jumlah sekolah, masalah kepatuhan anggaran dalam mengalokasikan biaya pendidikan sebanyak 20 hingga pengaruh politik anggaran. Pengaruh anggaran pendidikan dalam jangka pendek kadangkala meningkat juga mengalami penurunan pengaruhnya tidak stabil setiap periode kadang kala negatif demikian juga jumlah sekolah setiap periodenya. Hubungan antara jumlah sekolah dan anggaran pendidikan dalam jangka pendek ada yang positif juga ada yang negatif.

SARAN

Beberapa saran yang penulis berikan yaitu:

1. Walaupun tidak terdapat hubungan kausalitas secara langsung antara pengeluaran pendidikan dan jumlah sekolah, namun kedua variabel ini akan saling mempengaruhi dalam jangka pendek dan semakin kuat pengaruhnya dalam jangka panjang, sehingga kebijakan untuk melakukan pengeluaran pendidikan dengan melihat jumlah sekolah sangat penting.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambah periode pengamatan sehingga lebih mencerminkan keadaan jangka panjang, dan membandingkan penelitian sekarang ini dengan memasukkan variabel lainnya untuk penelitian yang ingin diteliti sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Aceh Barat Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh.
- _____. 2011. *Aceh Barat Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Meulaboh.
- Basri, Zainal dan Yuswan Subri Mulyadi. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ikhwan, Muhammad. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan PDRB Per Kapita Terhadap Pembangunan Pendidikan di Provinsi Aceh*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Ikhsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ismanthono, Henricus W. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Buku Kompas. Jakarta.

- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mulyadi, 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta.
- Nota Keuangan dan APBN, Tahun 2004.
- Rahaju, Siti. dkk. 2004. *Refleksi Pendidikan Masa Kini*. University Press UNESA. Surabaya.
- Rachim, Rizka Juita. 2013. *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swastadan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1996-2010*. Jurnal Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Said, Rusli. 2001. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Syakhiruddin. 2008. *Statistika Ekonomi*. CV. Perdana Mulya Sarana. Medan
- Sukma Sawitri, Adisti. 2005. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendidikan Dasar di Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.